



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 18 Maret 2013

Halaman: 2

**PEDAGANG WAJIB AJUKAN IZIN BARU**

## Pemkot Tata Ulang PKL Malioboro

**YOGYA (KR)** - Sesuai Perwal 37/2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro - Ahmad Yani, jumlah pedagang di wilayah itu tidak boleh bertambah. Hanya saja, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta belum mengantongi jumlah pasti PKL yang selama ini berjualan di Malioboro.

Oleh karena itu, Pemkot Yogyakarta mulai menata ulang PKL Malioboro agar pembinaannya bisa berjalan efektif. "Seluruh PKL di sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani harus mengajukan izin baru dari awal," ungkap Kepala UPT Malioboro, Syarif Teguh, Minggu (17/3).

Karena bersifat khusus, instansi yang bertanggung jawab terhadap keberadaan PKL Malioboro juga cukup banyak. Antara lain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian, Dinas Ketertiban, Badan Lingkungan Hidup maupun kecamatan. Berbeda dengan PKL di lokasi lain yang perizinannya cukup melalui kecamatan.

Penataan ulang itu agar seluruh PKL mengantongi Surat Izin Penggunaan Lokasi PKL dan Kartu Identitas PKL kawasan khusus. Syarif menambahkan, para PKL sebenarnya sudah memiliki kedua surat tersebut. Akan tetapi masa berlakunya banyak yang sudah habis dan belum pernah ada perpanjangan. "Makanya kan jumlah pastinya itu bera- pa, belum ada yang pasti. Hanya kami perkiraan sekitar 2.400 pedagang. Sekarang kami survei ulang lagi agar penataannya mudah," imbuhnya.

Seperti yang tertuang dalam perwal, pengajuan izin PKL di Malioboro harus dilampiri dengan fotocopy KTP Kota/ Kabupaten di DIY, surat pernyataan belum memiliki tempat usaha serta berbagai surat kesanggupan untuk men- taati peraturan. Selain itu, para PKL ju- ga harus mendapat izin pemilik persil yang digunakan sebagai tempat ber- jualan.

Setelah surat pengajuan itu disam- paikan ke petugas, maka tim yang ter- diri dari berbagai instansi di pemkot akan melakukan verifikasi. Ditargetkan, penataan ulang PKL Malioboro itu bisa diselesaikan tahun ini.

"Dalam perwal itu kan juga sudah diatur jarak PKL agar tidak berhimpit- an seperti sekarang ini. Nanti jika data pasti sudah kami pegang, maka penye- suaian perwal bisa lebih mudah," pa- rnyanya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Ko- munitas Kawasan Malioboro (LPKKM) yang juga Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (APKLY), Rudiarto mengungkapkan, hingga kini sudah 80 persen PKL di Malioboro yang menga- jukan izin baru. Sedangkan 20 persen lain masih melakukan proses.

Rudiarto memastikan, para PKL selu- ruhnya akan mengikuti penataan ulang yang dilakukan oleh pemkot tersebut. Saat ini, para pedagang meminta agar proses verifikasi terhadap pengajuan izin tersebut bisa segera dilakukan. "Para PKL ini sebelumnya sudah memi- liki izin. Tetapi sejak 2004 hingga 2006 banyak yang sudah habis izinnya. Saat hendak memperpanjang, aturan sudah berubah," terangnya.

(R-9)-a

**Tindak Lanjut**

Ditanggapi

| Instansi                                              | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                    | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per |              |        |                 |
| 3. Dinas Ketertiban                                   |              |        |                 |
| 4. Badan Lingkungan Hidup                             |              |        |                 |
| 5. UPT. Malioboro                                     |              |        |                 |

Yogyakarta, 13 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

